

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel; sehingga memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011) dalam Adi Susanto, 2018.

Pada hakekatnya, orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dengan mendasarkan pada konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat berhubungan dengan perubahan mekanisme dan instrument pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja focus pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga pembenahan instrument dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup: (1) laporan realisasi anggaran, (2) Neraca keuangan daerah, (3) Laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan laporan keuangan yang merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah dalam 1 (satu) periode anggaran (Hariadi, 2010 dalam Iskandar, 2015).

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-

luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat prediksi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. Menurut BPK banyak data aset kota yang tidak jelas luasnya. (*detik.com*)

Pengelolaan keuangan daerah dimana dana hibah bantuan sosial termasuk dalam komponen belanja daerah masih sangat diperlukan di Indonesia, tetapi dana bantuan sosial atau yang akrab ditelinga dengan sebutan bansos, untuk tahun anggaran 2015 akan dihapus. Dana bantuan sosial akan dihapus karena pemerintah menilai ada banyak penyimpangan dalam penyaluran dana bansos. Saking masifnya penyimpangan, banyak kepala daerah dan pejabat pemerintah yang pada akhir masa jabatannya harus tinggal di penjara. Mengingat deretan kasus hukum di Kota Bandung berkait dengan bansos, maka rasanya tepat jika pemerintah berinisiatif menghapus kucuran dana bansos, kecuali untuk beberapa yang dinilai ada manfaatnya dan tepat sasaran. (*tribunnews.com*).

Kaidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan paradigma baru pada era reformasi mengenai Profesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban dituntut untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara kesepadanan kemampuan dan keterampilan serta pengambil kebijakan yang menfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan manfaat.

Untuk menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut berupa sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008).

Dari hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, diantaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mahmudi,2011) dalam Wilfiavera, 2017.

Sistem pengendalian intern yang ada di lingkungan pemerintahan dikenal dengan sebutan sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP). Pengertian SPIP itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah menghasilkan temuan yang berbeda atau ada GAP hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2015) bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD kota padang, Sari (2017) pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi, Saputra (2018) sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kesalahan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prawira, dkk (2014) asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, Putri, dkk (2019) moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana moralitas individu berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang sejauh mana pengaruh moralitas dan pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Bagi Akuntansi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya maupun referensi lain bagi yang memerlukannya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah dan penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Luwu Utara. Pembahasan yang dilakukan agar penelitian terokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu Moralitas Individu (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2), sementara variabel terikatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Moralitas Individu

Moralitas atau moral berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral (*morale*) merupakan semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Moral dalam arti umum lebih menekankan pada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan pada peraturan (Umam, 2010 dalam Huljanah, 2019).

Menurut Budiningsih (2004:24) moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilemma etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral individu akan berpengaruh pada perilaku etis mereka. Ketika menghadapi dilema etika, pasti terdapat perbedaan antara orang dengan level penalaran moral yang rendah dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi. Orang dengan level penalaran moral yang semakin tinggi akan cenderung untuk berbuat sesuai aturan (Liyanarachi, 2009 dalam Dionisia, 2016).

2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga asset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan asset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal menejerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada, Romney dan Steinbart (2015) dalam Deka Efalba, 2019. Sistem pengendalian internal pemerintah, di dalamnya terdapat pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.

Muliyadi (2013:164) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan efektifitas operasi.

Menurut IAPI (2011:319), komponen pengendalian internal terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektifitas pengendalian internal.
2. Penilaian resiko, merupakan kegiatan penelian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi segera ditindaklanjuti.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban.

2. Ruang Lingkup Keuangan daerah

Jika berbicara tentang keuangan daerah, kita juga pasti akan berbicara mengenai ruang lingkupnya. Berikut ruang lingkup keuangan daerah menurut PP No.58 2005 , meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah pajak daerah serta retribusi daerah
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- c. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
- d. kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerinta daerah itu sendiri atau pihak lain. Kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang
- e. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum

3. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan antara lain:

a. Transparansi

Adanya keterbukaan pemerintah (Birokrasi) didalam proses pembuatan kebijakan tentang keungan daerah, sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keungan daerah atau APBD.

b. Efisiensi

Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi dengan kata lain standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.

c. Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD) pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini pemda sering tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau *output*.

d. Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya pertanggung jawaban kepada publik yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah

atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur sesuai apa yang direncanakan semula.

e. Partisipatif

Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikut sertakan masyarakat secara langsung.

2.4 Tinjauan Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira, dkk (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dan moralitas individu, asimetri informasi dan efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Iskandar (2015) menunjukan bahwa sistem kontrol internal pemerintah, sumber daya manusia kompetensi dan kontrol fungsional berpengaruh signifikan terhadap keefektivan area manajemen keuangan. Tinangon dan Budiarso (2015) hasil penelitian berdasarkan pedoman penilaian dan kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif.

Hasil penelitian Eliza (2015) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD kota Padang, sistem penendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD kota Padang. Sari (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Mulia dkk (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara moralitas individu dan kontrol internal, ketentuan kapan ada elemen pengendalian internal yang mempengaruhi orang dengan tingkat moral yang tinggi untuk cenderung tidak melakukan penipuan akuntansi. Sedangkan individu dengan tingkat moral rendah, ada atau tidak ada individu kontrol internal yang cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

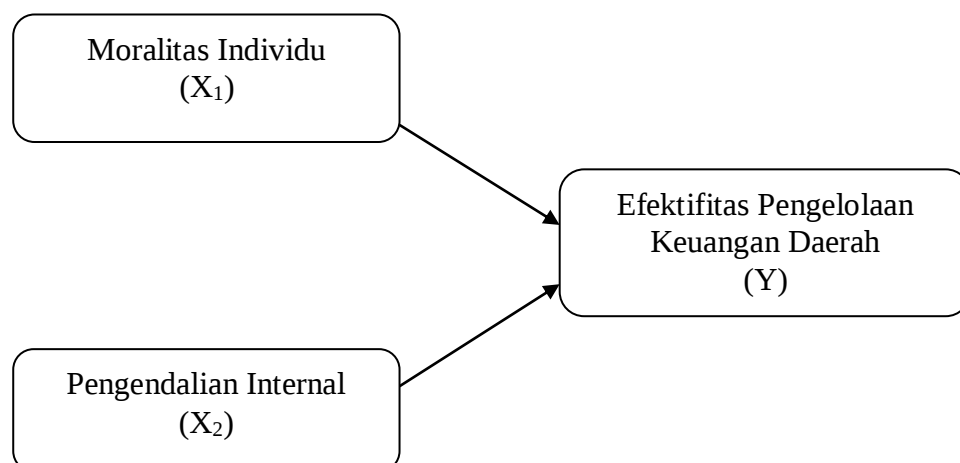
Dennyningrat dan Saputra (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas individu berpengaruh negatif pada kesalahan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Putri dkk (2019) diperoleh hasil bahwa moralitas individu secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal dan budaya organisasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas individu, pengendalian internal dan budaya organisasi secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Rahmi dan Helmayunita (2019)

menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sumtaky dan Chandrarin (2018) *the effectiveness of financial planning has a significant effect on the performance SKPD, as well as to encourage increased public satisfaction of public services.*

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting, dimana telah diketahui dalam faktor-faktor yang penting tersebut terdapat beberapa suatu masalah. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah moralitas individu, pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2013:98). Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya Moralitas Individu (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2), Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dalam hipotesis berikut:

- H₁: Diduga bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara
- H₂: Diduga bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Silalahi, 2012). Desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Luwu Utara. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama dua bulan di tahun 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Adapun populasi yang menjadi objek penelitian adalah pegawai yang terkait dengan aparat pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing BPKAD kabupaten luwu utara. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan (kuesioner) pada aparat pengelolaan keuangan daerah SKPD kabupaten luwu utara.
2. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini dan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan-laporan, publikasi pemerintah, analisis para ahli-ahli, perpustakaan, Kantor SKPD kabupaten luwu utara.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket (kuesioner) yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada 4 responden yang sudah tersusun secara sistematis terkait masalah penelitian.
2. Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mendalami dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, dalam rangka memperoleh data sekunder yang sifatnya teoritis dan digunakan sebagai pembanding dalam pembahasan nantinya.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Operasional variabel diperlukan untuk menentukan indikator, serta variabel – variabel yang terkait dalam penelitian

1. Moralitas Individu (X_1)

Moralitas Individu merupakan perilaku dan sikap yang baik, dimana seseorang tersebut tanpa pamrih atau tidak meminta balasan. Indikator Moralitas Individu dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pre-conventional
- b. Conventional
- c. Post-conventional

2. Pengendalian Internal (X_2)

Pengendalian Internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, efektivitas dan efisiensi operasi. Indikator Pengendalian Internal dalam penelitian ini meliputi :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Aktivitas pengawasan
- e. Komunikasi dan informasi

3. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pengelolaan Keuangan Daerah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian ini meliputi :

- a. Perencanaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan keuangan daerah
- c. Pelaporan keuangan daerah
- d. Pertanggungjawaban keuangan daerah

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan secara detail. Penelitian teknik analisis deskriptif mencoba memberikan keadaan masa sekarang secara mendalam dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari aparat/pegawai pengelolaan keuangan. Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima tahap. Pertama uji validitas dan uji reliabilitas, kedua uji asumsi normalitas, ketiga melakukan pengujian asumsi klasik multikolinieritas, keempat uji heteroskedastisitas, dan model analisis regresi linear berganda.

1. Uji Validitas dan Realibitas

- a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) $> r$ table. (Ghozali, 2005).

b. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap item pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika nilai Alpha (α) $\geq 0,7$. Pengujian realibilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha. (Ghozali, 2005).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi heteroskedastisitas, dan linieritas (suliyanto, 2011, p. 69). uji asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak

dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2011: 160-165).

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafikplot, uji park, uji glejser, dan uji wite.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (suliyanto, 2011.p.37). Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat di tuliskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Efektifitas pengelolaan keuangan daerah

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = koefisien regresi

X_1 = Moralitas Individu

X_2 = Pengendalian internal

e = Variabel Gangguan/ kesalahan (*disturbance error terms*)

b. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Hengki Latan, 2013:80). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

c. Uji t (Uji Parsial)

Menurut (Hengki Latan, 2013:81) uji t merupakan uji untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial atau terpisah.

d. **Uji F**

Ghozali (2011.p.101) menjelaskan, uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat. Kriteria dalam menguji statistik F sebagai berikut, bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut fungsi baan pengelola keuangan dan aset daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksaaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
4. Pengelolaan adminisrtasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan mempertimbangkan strategi yang ada, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

“terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik”

Dalam visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatas terkandung makna sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu Utara yang transparan, yang berarti pengelolaan keuangan dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah bersifat jelas dan terbuka disertai ketersediaan informasi yang lengkap.
2. Pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu Utara yang akuntabel, yang berarti pengelolaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
3. Pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu Utara berorientasi publik adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Luwu

Utara dalam hal ini penganggaran yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Berikut ini dijabarkan tentang misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta tujuan, sasaran dan indikator untuk mewujudkan misi tersebut :

1. Mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang efektif, efisien dan optimal
2. Memacu pengelolaan APBD yang berkualitas, berorientasi publik, berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan kinerja pemda Kab. Luwu Utara
4. Penyajian informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan pemerintah Daerah yang akurat, komprehensif dan akuntabel.
5. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.2 Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan pada tahun 2020. Responden berasal dari unit bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang pembendaharaan dan bidang aset di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden terdiri dari : jenis kelamin, masa jabatan dan jenjang pendidikan.

Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang diseberkan	50
2	Kuesioner yang direspon/dikembalikan	40
3	Keusioner yang tidak direspon	10
4	Tingkat Pengembalian	$40/50 \times 100\% = 80\%$

Sumber : Data Primer 2020

Tabel 4.1 diatas memperlihatkan bahwa dari 50 kuesioner yang dibagikan terdapat 10 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 40 yang dikembalikan. Jika dipersentasekan tingkat pengembalian kuesioner adalah 80%.

Penyebaran sebanyak 50 kuesioner dilakukan mulai tanggal 24 September 2020 dan pengumpulan sampai tanggal 25 Oktober 2020 sebanyak 40 kuesioner yang kembali dan dapat diolah seluruhnya. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	18	45%
Wanita	22	55%
Total	40	100%

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden jenis kelamin wanita lebih besar yaitu 55% dibandingkan dengan pria yang hanya 45%.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1-5	35	87,5%
6-10	5	12,5%
Total	40	100%

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dari 40 responden yang menjadi objek penelitian, terlihat responden dengan masa kerja 1-5 tahun lebih banyak yaitu 87,5% sedangkan masa kerja yang paling sedikit adalah 6-10 tahun yaitu 12,5%.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	12	30%
S1	24	60%
S2	4	10%
Total	40	100%

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa responden dengan jenjang pendidikan lebih banyak adalah S1 yaitu 60% sedangkan jenjang pendidikan yang paling sedikit adalah S2 yaitu 10%.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner maka perlu dilakukan uji validitas yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor sehingga didapat nilai *pearson*

correlation. Cara mengetahui valid tidaknya sebuah butir pernyataan dapat menggunakan rumus jika r hitung $> r$ tabel = valid, sebaliknya jika r hitung $< r$ tabel = tidak valid, penentuan r tabel yaitu : $df = N - k$ dengan signifikan 5%, jadi angka r tabel yang didapat dari distribusi $df = 40 - 2 = 38$ jadi (0,312) hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Moralitas Individu (X ₁)	X1.1	0,745	0,312	Valid
	X1.2	0,665	0,312	Valid
	X1.3	0,713	0,312	Valid
	X1.4	0,778	0,312	Valid
	X1.5	0,780	0,312	Valid
	X1.6	0,649	0,312	Valid
Pengendalian Internal (X ₂)	X2.1	0,700	0,312	Valid
	X2.2	0,541	0,312	Valid
	X2.3	0,599	0,312	Valid
	X2.4	0,675	0,312	Valid
	X2.5	0,605	0,312	Valid
	X2.6	0,598	0,312	Valid
	X2.7	0,599	0,312	Valid
	X2.8	0,563	0,312	Valid
	X2.9	0,445	0,312	Valid
	X2.10	0,497	0,312	Valid
	X2.11	0,574	0,312	Valid
	X2.12	0,405	0,312	Valid
	X2.13	0,490	0,312	Valid
	X2.14	0,512	0,312	Valid

	X2.15	0,449	0,312	Valid
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,684	0,312	Valid
	Y2	0,523	0,312	Valid
	Y3	0,627	0,312	Valid
	Y4	0,651	0,312	Valid
	Y5	0,585	0,312	Valid
	Y6	0,635	0,312	Valid
	Y7	0,605	0,312	Valid
	Y8	0,553	0,312	Valid
	Y9	0,456	0,312	Valid
	Y10	0,519	0,312	Valid
	Y11	0,563	0,312	Valid
	Y12	0,364	0,312	Valid
	Y13	0,462	0,312	Valid
	Y14	0,537	0,312	Valid
	Y15	0,414	0,312	Valid

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel diatas, instrumen kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan dapat dikatakan valid, karena korelasi antara skor masing-masing pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,312.

2. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran kembali terhadap gejala yang sama maka dalam penelitian ini dilakukan uji reliabilitas. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel, apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan jawaban atau data yang sama pula. Teknik *cronbach's alpha* digunakan dalam uji reliabilitas. Jadi suatu pengukuran

dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0.6 dan untuk nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

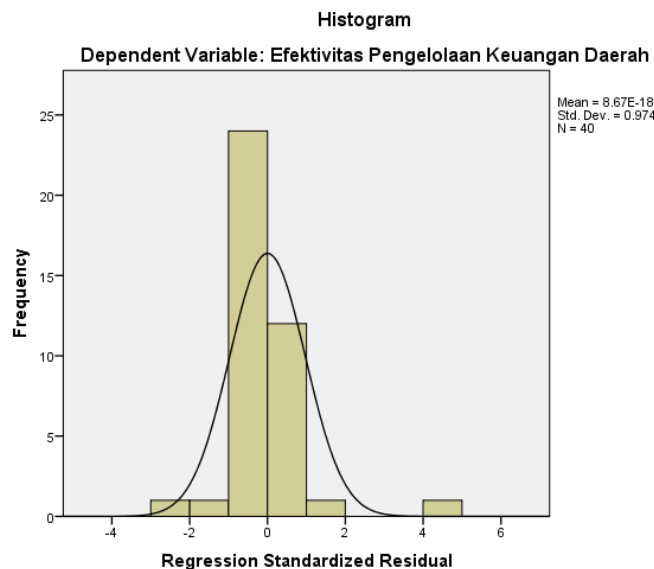
Variabel	r hitung	Keterangan
Moralitas Individu (X_1)	0,782	Reliabel
Pengendalian Internal (X_2)	0,741	Reliabel
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,740	Reliable

Dari hasil uji reliabilitas di atas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai *cronbach's alpha* > 0.6 sehingga digunakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram



Gambar 4.1
Grafik Histogram

Dengan melihat grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi hasil dari grafik histogram ini terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

2. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Kriteria pengambilan keputusan uji ini yaitu : jika nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai *tolerance* < 10 atau sama dengan nilai VIF > 10 menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Berikut adalah hasil multikolinieritas yang dapat dilihat pada table 4.7.

Table 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.484	8.049		2.669	.011		
Moralitas Individu	-.139	.183	-.085	-.756	.000	.990	1.010
Pengendalian Internal	.707	.110	.722	6.441	.000	.990	1.010

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS, 2020

Dari table 4.7 dapat dilihat model uji hipotesis memiliki *tolerance* 0,99 dan VIF 0,01 yang berarti nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dari model uji hipotesis terbebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang mengusulkan untuk meregresi pada uji ini yaitu : jika probabilitas Sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dapat dilihat pada table 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.484	6.407		2.885	.006
Moralitas Individu	-.260	.146	-.271	-1.784	.083
Pengendalian Internal	-.182	.087	-.316	-2.084	.044

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS, 2020

Dilihat dari table 4.8 hasil model uji hipotesis moralitas individu (X_1) menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,083 dan pengendalian internal (X_2) menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.044 yang berarti model uji hipotesis memiliki nilai > 0.05 . dapat di simpulkan bahwa kedua model uji hipotesis terbebas dari masalah heterokedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Moralitas Individu (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hal itu dapat dilihat pada persamaan regresi linier sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.484	8.049		2.669	.011
Moralitas Individu	-.139	.183	-.085	-.756	.000

Pengendalian Internal	.707	.110	.722	6.441	.000
-----------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS, 2020

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian:

$$Y = 21,484 - 0,139 + 0,707 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 21.484 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) akan bernilai 21.484 dan moralitas individu dan pengendalian internal masing-masing 0.
- Variabel moralitas individu memiliki koefisien regresi negative sebesar - 0,139. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel moralitas individu, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar (- 0,139).
- Variabel pengendalian internal memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,707. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel pengendalian internal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,707 atau 70,7%.

2. Uji t (parsial)

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah moralitas individu dan pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih kecil dari

0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.10
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.484	8.049		2.669	.011
Moralitas Individu	-.139	.183	-.085	-.756	.000
Pengendalian Internal	.707	.110	.722	6.441	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS, 2020

a. Uji hipotesis 1: moralitas individu berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel moralitas individu memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung negatif (-0,139), sehingga variabel moralitas individu berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan dapat dikatakan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat moralitas individu maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan cenderung meningkat.

b. Uji hipotesis 2: pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel pengendalian internal memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t-hitung positif 0,707, sehingga variabel pengendalian

internal berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan dapat dikatakan bahwa H2 diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi pengendalian internal maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

3. Uji F

Uji F untuk menguji secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikan sebesar 0.05.

Tabel 4.11

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	841.355	2	420.678	21.750	.000 ^b
	Residual	715.620	37	19.341		
	Total	1556.975	39			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Moralitas Individu

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.11, jika pengambilan keputusan berdasarkan nilai Ftabel yaitu 3.24 sedangkan nilai f hitung sebesar 21.750 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga variabel moralitas individu dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Hasil uji koefisien determinasi

Tabel 4.12

Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.735 ^a	.540	.516	4.398
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Moralitas Individu

Sumber: Output SPSS, 2020

Hasil analisis uji koefisien berganda tersebut dapat terlihat pada tabel 4.12 dari adjusted R Square sebesar 0,516 menunjukkan bahwa sebesar 51,6% variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel moralitas individu dan pengendalian internal, sedangkan sisanya sebesar 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh moralitas individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh moralitas individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi sebesar (-0,139) dan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira dkk (2014) yang menunjukkan bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi yang artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu, semakin individu mempertahankan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasi semata, apalagi kepentingan individu. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu seseorang maka kemungkinan

orang tersebut memiliki efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin menurun atau rendah.

2. Pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Luwu Utara. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi sebesar 0,707 dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa pengendalian internal yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2017) yang menyatakan bahwa semakin efektif pengendalian internal dalam suatu instansi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut.

3. Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen moralitas individu (X_1) dan pengendalian internal (X_2) memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Nilai F_{tabel} yaitu 3.240 sedangkan nilai f hitung sebesar 21.750 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga variabel moralitas individu

dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Philep dkk (2018) yang menyatakan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa dari penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dalam penelitian ini variabel moralitas individu (X_1) memiliki nilai signifikan $= 0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien negatif (-0,139). Maka disimpulkan bahwa moralitas individu (X_1) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan (Y). Artinya, semakin tinggi level penalaran moral seseorang maka akan menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk hasil variabel (X_2), hasil pengujian terhadap variabel pengendalian internal (X_2) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien positif 0,707. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pengendalian internal yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pada pemerintah daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Luwu Utara yang menjadi subjek

dalam penelitian ini agar tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam pelaporan keuangan yang berkualitas berdasarkan pedoman serta peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Bagi penulis selanjutnya yang tertarik meneliti dengan masalah yang sama diharapkan subjek penelitian tidak hanya berfokus pada satu SKPD seperti dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Luwu Utara saja, namun diharapkan dapat melakukan penelitian pada beberapa SKPD agar menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfianti, D. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang).
- Damayanti, D. N. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Skripsi* .
- Dennyningrat, I. G., & Suputra, I. D. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Moralitas Individu Pada Kesalahan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22 (2).
- Efalba, D. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial. *Skripsi* .
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1),86-100.
- Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huljanah, D. N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Doctoral dissertation, IAI Surakarta).
- Iskandar, J., Ratnawati, V., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015.
- Mardiasmo. (2014). Anggaran Yaitu Suatu Rencana Yang DiSusun Secara Sistematis Yang Meliputi Seluruh Kegiatan Perusahann. *Jurnal* .
- Mulia, M. H., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18 (2),1998-208.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Prawira, I. M., Herawati, N. T., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asetimetri Informasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2 (1).

Putri, D. C., hartono, & Hidayat, E. N. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2),129-142.

Rahmi, N. A., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1 (3),826-977.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3 (4).

Simahate, F. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi*.

Sumtaky, M., Chandrarin, G., & Sanusi, A. (2018). Effect of elements of regional financial management towards SKPD regency/city performance and its implication on public service. *International research journal of engineering, IT & scientific research*, 4 (2).

Suryanto, S. (2019). Analysis of Regional Financial Information Systems As A Media of Regional Financial Management Transparency In Indonesia. *In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662 (2).

Udayani, A. A., & Sari, M. M. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18 (3).

Umam, K. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Wilfiavera. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kota Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).